

KPK Diminta Bongkar Semua Korupsi Di PLN

Yang Terlibat Harus Dijerat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan hanya menyelidiki proyek rencana induk sistem informasi PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang periode 2003-2005. Lembaga itu diharapkan membongkar semua korupsi yang terjadi di perusahaan tersebut.

APALAGI PLN sangat bersentuhan dengan masyarakat. Kalau terjadi korupsi maka masyarakat juga yang kena dampaknya.

Hal itu disampaikan Ketua Barisan Suara Muda Indonesia (Basmi) Sayed Junaidi Rizaldi. Sayed meminta KPK menindaklanjuti kasus PLN ke tahap lebih lanjut. Mengingat PLN adalah institusi pemberi pelayanan terhadap masyarakat dalam pelayanan listrik.

"KPK harus meningkatkan kasus itu bukan hanya tahap meminta keterangan saja, tapi juga pada tahap penyidikan," kata Sayed.

Sayed juga mendesak peme-

rintah agar aktif mendorong PLN menyelesaikan permasalahan terkait dengan pelayanan listrik. Pemerintah harus mengeluarkan tindakan tegas bila nantinya dalam penyelidikan menemukan unsur kelalaian yang dilakukan PLN.

Mengenai dugaan kelalaian PLN melaksanakan tugasnya selaku penyedia listrik, Sayed menyerahkan hal ini pada mekanisme hukum yang berlaku.

"Harus ada tindakan tegas dan keberanian KPK untuk menuntut kasus dugaan korupsi di PLN. Artinya, bongkar semua kasus di situ, jangan diambang-kan yang akhirnya mandek,"

jelasnya.

Untuk itu, Sayed berharap KPK bekerja lebih maksimal untuk mencari kebenaran kasus ini.

Sementara itu Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Husna Zahir berharap aparat penegak hukum seperti KPK memproses kasus yang diduga merugikan masyarakat.

"Jika benar ada dugaan korupsi yang terjadi di sana, untuk institusi atau lembaga manapun sewajarnya KPK menindak. Apalagi PLN itu menyangkut kepentingan masyarakat," kata Husna.

Husna mempertanyakan, kenapa kasus dugaan yang terjadi pada periode 2003-2005 bisa selama itu terkesan terpendam. Apakah di dalam internal PLN, pengawasannya secara internal tidak berjalan sebagaimana harusnya.

Untuk itu, Husna menyatakan,

sebagai institusi pelayanan publik seharusnya ada transparan dan akuntabilitas dalam meningkatkan pelayanan.

"Kini tinggal kembali ke profesionalisme masing-masing penegak hukum. Yang jelas kasus ini harus ditindaklanjuti dengan baik dan benar," ujarnya.

Seperti diberitakan, KPK memeriksa Dirut PLN Fahmi Mochtar pada Kamis (12/11). Fahmi mengatakan, kedatangannya ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, dia tidak mau menjelaskan diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa siapa. "Saya dimintai keterangan soal rapat koordinasi saja, detailnya tanya pada KPK saja," kata Fahmi.

Selain melakukan penyelidikan kasus sistem informasi PT PLN, KPK saat ini juga sudah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek layanan pelanggan berbasis *customer management system* (CMS) di PT

PLN Jawa Timur.

Hasil pemeriksaan BPK pada semester kedua 2007 menyatakan, pelaksanaan pengembangan rencana induk sistem informasi pelayanan pelanggan atau CMS pada unit bisnis dan distribusi atau wilayah tidak sesuai standar.

Proses pengadaan CIS juga dinilai tak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, ada potensi ketidakhematan pengeluaran biaya dalam pengadaan jasa CIS dengan nilai total pengadaan Rp 241,5 miliar. Proyek itu dilakukan melalui penunjukan langsung.

Sebelumnya, KPK telah menahan mantan General Manager PLN Jawa Timur Hariadi Sadono terkait dengan dugaan korupsi proyek sistem pelayanan pelanggan (CMS). Proyek pelayanan pelanggan tersebut menyerupai proyek yang sama dengan PLN Jakarta. ■ LID